

REPRESENTASI PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM JURNAL PEREMPUAN

Tantri Puspita Yazid

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau Pekanbaru
e-mail: tantri3313@gmail.com

Abstract: This research is entitled The Representation of Minangkabau Woman's in the Article "Peraturan Daerah dan Kearifan Terhadap Perempuan" (The Regional Regulation and Wisdom Towards Woman). This is a research on an article in the 57th edition of *Jurnal Perempuan*. This is a qualitative research which used the Sara Mills' model of Critical Discourse Analysis (CDA) method with a feminist perspective. This research commenced with the assumption that *Jurnal Perempuan* is constructing Minangkabau Woman in their text article by patriarchic ideology, where the position of Minangkabau woman are cornered by the Regional Rule. The aim of this research is to reveal the image of Minangkabau woman shown in the "Peraturan Daerah dan Kearifan Terhadap Perempuan" (The Regional Regulation and Wisdom Towards Woman) article written by Sudarto in the 57th edition of *Jurnal Perempuan*; the illustration of Minangkabau woman in the article and also the interpretation of the readers. This critical discourse analysis researched the article on the macro, micro and representation level. In this article, focus on macro and representation level. The data in this study were obtained through in-depth interviews, observation, and literature. Results obtained from this study is the image of women portrayed in the article text Minangkabau with the woman who is weak and has always been the victim of regional regulations customs and religious bias. It is revealed either by positioning the reader to accept the ideas that women are always the victims minangkabau regulation revealed by the author, or by positioning the subject - object, where the object penceritaan Minangkabau women into government and became the subject of storytelling. However, the author of the article in favor of women Minangkabau, read with the provocation-provocation by the author in the text atikel.

Key Word: critical discourse analysis, minangkabau woman, mass communication

Abstrak: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis model Sara Mills dengan perspektif feminis . Penelitian ini bermula dari asumsi bahwa *Jurnal Perempuan* tengah mengkonstruksi perempuan Minangkabau di dalam teks artikelnnya berdasarkan ideologi patriarki, dimana perempuan Minangkabau posisinya tersudutkan dengan adanya Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan mencari tahu bagaimana citra perempuan Minangkabau digambarkan dalam artikel "Peraturan Daerah dan Kearifan Terhadap Perempuan" yang ditulis oleh Sudarto yang dimuat dalam *Jurnal Perempuan* edisi 57. Bagaimana perempuan Minangkabau dalam teks dan bagaimana teks tersebut ditafsirkan oleh pembaca. Analisis wacana secara kritis ini meneliti artikel pada level makro, mikro, dan representasi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah citra perempuan Minangkabau digambarkan dalam teks artikel dengan sosok perempuan yang lemah dan selalu menjadi korban Peraturan Daerah yang bias adat dan agama. Hal ini terungkap baik melalui pemosisian pembaca untuk menerima gagasan-gagasan bahwa perempuan minangkabau adalah selalu menjadi korban Perda yang diungkap penulis, maupun melalui pemosisian subjek – objek, dimana perempuan Minangkabau menjadi objek penceritaan dan pemerintah menjadi subjek penceritaan. Namun, penulis artikel berpihak pada perempuan Minangkabau, terbaca dengan adanya profokasi-profokasi yang dilakukan penulis dalam teks atikel.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, perempuan minangkabau, komunikasi massa

PENDAHULUAN

Dunia perempuan mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak didapatkan di dunia lain. Oleh karena itu tak heran bila perempuan sering dijadikan topik pembicaraan, termasuk dalam media massa. Pembicaraan mengenai perempuan tidak terlepas dari lingkungan serta keadaan sosial tempatnya tinggal, misalnya perempuan Minangkabau di Sumatera Barat. Perempuan dalam adat Minang-

kabau di Sumatera Barat, sangat dihormati dan diberi penghargaan tertinggi. Dalam adat tersebut, perempuan ditempatkan sebagai sosok yang dikagumi, dilindungi, dan dihormati keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perlakuan khusus yang diberikan kepada kaum perempuan. Perempuan Minangkabau disebut dengan istilah *Bundo Kandung*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai ibu kandung. *Bundo Kandung*

memiliki peranan penting, bertugas membagi dan menjaga harta pusaka. Selain itu, penarikan garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, yang disebut sistem matrilineal. Misalnya, jika ibu bersuku Piliang, ayah bersuku Tanjung, maka anak akan mengikuti garis keturunan ibu, yaitu bersuku Piliang, walaupun ayahnya juga berasal dari Sumatera Barat. Hal ini berbeda dari daerah lain di Indonesia yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah, disebut sistem patrilineal.

Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu *mater* (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "Matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu". Adat matrilineal lebih jarang digunakan kelompok masyarakat dunia dibandingkan patrilineal yang lebih umum penggunaannya. Tatanan adat Minangkabau ternyata tidak terlepas dari peran agama. Hal tersebut dapat dilihat dari falsafah, "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Mayoritas masyarakat Minangkabau beragama Islam dapat dilihat dari falsafah ini, adat yang berdasarkan syariat Islam, syariat yang berdasarkan kitab Al-qur'an.

Keadaan tersebut diperkuat dalam peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Misalnya, Perda Solok Sumatera Barat tahun 2000; Instruksi Walikota Padang, No.451.422/Binsos-III/2005, tertanggal 7 Maret berisi perintah wajib memakai jilbab dan busana Islami bagi orang Islam dan anjuran memakainya untuk non-Islam¹.

Artikel yang berjudul "Peraturan Daerah dan Kearifan Terhadap Perempuan" ini, perempuan Minangkabau diposisikan sebagai kaum yang menjadi sumber maksiat yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam sehingga harus ditutup rapat. Diatur cara berbusana dan gerak-geriknya dalam badan hukum. Pada artikel ini, perempuan di Sumatera Barat digambarkan sering menjadi korban razia petugas. Salah satunya menimpa perempuan yang baru pulang dari rumah saudaranya kira-kira pukul sepuluh malam. Karena tidak ada kendaraan, ia menumpang mobil sayur yang menuju pasar. Di tengah jalan, mobil dihentikan polisi dengan alasan razia senjata tajam. Namun, karena melihat di mobil ada

perempuan, target operasi berubah menjadi penangkapan perempuan tersebut dengan tuduhan Pekerja Seks Komersial (PSK). Tidak tanggung-tanggung, di kantor Polsek Pesisir Selatan, ia disuruh mempraktikkan cara menggoda laki-laki. Akhirnya, tanpa memberitahukan pihak keluarganya, ia dikirim ke panti rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender.

Laki-laki dan perempuan secara seksual memiliki kedudukan yang sama, keduanya memiliki peran yang sama pentingnya agar dapat bereproduksi. Hal ini disebut perbedaan alamiah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Namun, akibat konstruksi sosial dan kultur yang berbeda dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan kemudian memiliki peran sosial yang berbeda. Peran sosial inilah yang disebut gender. Perbedaan peran sosial akibat bentukan sosial disebut perbedaan gender, dimana hal ini dapat melahirkan kesenjangan gender. Salah satu jenis kelamin menjadi superior dan jenis kelamin yang lain menjadi subordinat. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki berada dalam posisi yang diuntungkan. Perempuan seringkali dirugikan karena secara langsung atau tidak langsung ditempatkan pada posisi yang tidak seimbang dengan laki-laki. Misalnya, laki-laki yang dianggap pemimpin dan berkuasa penuh atas keluarganya. Sementara perempuan yang mendampingi laki-laki hanyalah "*konco wingking*", yang harus mengikuti kemauan laki-laki dan tidak boleh menolak. Perempuan hanya bertugas mengurus rumah, melahirkan, menjaga anak, selalu dianggap bersalah dan lemah. Bahkan ruang gerak perempuan diatur oleh badan hukum yang membonceng nama agama untuk melegitimasiannya. Seperti yang terdapat dalam artikel ini, peraturan daerah secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan Minangkabau.

Ketimpangan gender dalam bidang hukum dijumpai pada tiga aspek hukum sekaligus, yaitu: pada materi hukum, budaya hukum, dan struktur hukumnya. Pada aspek struktur, ketimpangan gender ditandai dengan masih rendahnya sensitivitas gender di antara penegak hukum, terutama di kalangan polisi, jaksa, dan hakim. Pada aspek budaya, hukum ternyata juga masih banyak dipengaruhi nilai-nilai patriarki yang kemudian mendapat

¹ Sumber: Jurnal Perempuan edisi 49, halaman 128

legitimasi dari interpretasi agama. Tidak heran jika selanjutnya agama dituduh sebagai salah satu unsur yang melanggengkan budaya patriarki dan mengekalkan ketimpangan relasi gender dalam hukum.

Kita dapat melihat materi hukum dalam peraturan daerah sarat dengan muatan nilai-nilai patriarki yang bias gender. Peraturan-peraturan daerah itu meminggirkan perempuan dan tidak menghargai keberagaman budaya dan kebebasan beragama masyarakatnya. Contohnya, Perda Kabupaten Gawo No.7 Tahun 2003 melarang perempuan berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya, khususnya setelah pukul dua belas malam, Perda Tangerang No 8 Tahun 2005 mengizinkan menangkap perempuan di tempat umum karena mungkin ia sedang melacur. Perda Aceh No 14 tahun 2003 tentang larangan berkhalwat (berpacaran). Surat edaran Bupati pamekasan, Jawa Timur No.450 tahun 2002 tentang kewajiban berjilbab bagi karyawan pemerintah. Perda Solok Sumatera Barat tahun 2000; Instruksi Walikota Padang, No.451.422/Binsos-III/2005, tertanggal 7 Maret berisi perintah wajib jilbab dan busana Islami bagi orang Islam dan anjuran memakainya untuk non-Islam².

Kesetaraan dan keadilan gender dewasa ini menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terkait dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan sosial dan hukum, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai dan sosial budaya masyarakat yang memakai ideologi patriarki, lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender

ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan serta perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi juga berarti memiliki wewenang untuk memperoleh perlindungan hak azazi manusia.

Media massa yang diharapkan dapat mensosialisasikan masalah gender kepada masyarakat luas, ternyata masih kurang sensitif terhadap masalah tersebut. Bahkan yang terjadi, hampir setiap hari masyarakat disodori dengan tayangan *infotainment* yang membahas soal kehidupan selebriti tidak hanya mengenai aktivitas mereka, namun juga masalah pribadi mulai dari soal pacaran, perkawinan, perceraian, kelahiran anak, dan kematian. Bahkan terkadang isu perselingkuhan. Ditambah lagi puluhan tabloid yang menjajikan banyak hal yang berkaitan dengan dunia selebriti. Seolah-olah itu adalah dunia yang perlu dicermati sedemikian detail setiap sisi kehidupannya dan perlu menjadi panutan bagi pembaca dan penontonnya. Hal yang tidak bisa dibantah bila media massa mempunyai peran sangat signifikan dalam proses sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.

Signifikansi peran media massa juga terletak pada eksistensinya sebagai salah satu tonggak demokrasi, yang sekarang menjadi *mainstream*. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya ruang publik yang bebas (*a free public share*) dan penghargaan terhadap hak azazi manusia (*equality*).

Media massa selain sebagai sumber informasi dan lembaga sosialisasi pesan bagi khalayak ternyata memiliki kemampuan untuk merefleksikan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Debra H. Yatim, media memiliki hubungan dua arah dengan realitas sosial. Di satu pihak media menjadi cermin bagi keadaan sekelilingnya, tapi di lain pihak ia juga membentuk realitas

² sumber: Jurnal perempuan edisi 49:127-129

sosial itu sendiri (Yatim dalam Ibrahim dan Suranto, 1998:134)

Pada umumnya, media massa sedikit sekali memunculkan isu tentang perempuan sesuai dengan kenyataan yang benar terjadi. Jika pun ada, media cenderung memberi ruang hanya pada hal-hal yang bersifat urusan perempuan, seperti rumah tangga, mode, mengurus anak. Secara arogan media massa mengaku memiliki hak untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan oleh perempuan. Sering kali media massa menulis bahwa partisipasi perempuan di dunia publik hanyalah kejahatan kapitalisme yang membanting nilai-nilai kemanusiaan mereka dibawah nilai-nilai produksi dan pasar.

Melihat kekuatan media massa dalam pembentukan opini masyarakat, media massa juga memiliki andil yang besar dalam membentuk sikap dan perilaku yang menentukan status perempuan di dalam masyarakat. Patut dicatat, di negara berkembang seperti Indonesia, sikap yang umum terhadap media adalah penerimaan secara tidak kritis terhadap setiap sudut pandang serta penyajian fakta dan opini yang ditawarkan media (Yatim dalam Ibrahim dan Suranto, 1998:135)

Distorsi semacam ini dapat melestarikan ketimpangan yang ada. Masyarakat awan akan melihat peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelengkap. Cara masyarakat awam melihat peran ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang menentukan status perempuan itu sendiri di dalam kehidupan sosial. Realita media di Indonesia menunjukkan adanya bias gender dalam representasi pada media, baik cetak maupun elektronik. Berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti subordinasi, stereotip atau label negatif, kekerasan dan beban kerja. Secara tidak langsung dan tanpa disadari perempuan sesungguhnya cenderung dijadikan objek. Terbitnya majalah, tabloid, dan berbagai macam produk telah menggiring perempuan menjadi sasaran kaum kapitalis. Sesuatu yang tidak diperlukan perempuan dibuat sedemikian rupa sehingga perempuan merasa wajib memiliki atau menggunakannya.

Kenyataan inilah yang umumnya tergambar dalam majalah wanita. Dengan stereotip yang berkembang di masyarakat, majalah

wanita semakin mengukuhkan diri perempuan dalam pemberitaan yang timpang. Terbukti dalam banyak majalah wanita, perempuan digambarkan sebagai sosok ideal dimata laki-laki jika bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar, yang mahir memasak, ulet mengurus anak, ditambah lagi menuruti apa kata suami. Belum lagi pada majalah wanita dengan segmen pembaca wanita perkotaan, sosok wanita dinamis, pintar, aktif, agresif, berpendidikan tinggi, seksi, cantik, menjadi tuntutan laki-laki bagi perempuan jaman sekarang.

Majalah wanita memiliki andil besar dalam menanamkan dan melestarikan nilai-nilai tersebut. Bahkan dalam tulisan-tulisannya yang mengulas relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, majalah wanita menempatkan pembacanya dalam posisi yang menganut standar wanita ideal menurut majalah wanita tersebut. Hal ini mungkin terjadi jika melihat kekuatan media yang mampu mempengaruhi opini masyarakat. Representasi perempuan dalam suatu media apalagi media wanita menjadi elemen utama dalam menentukan citra media tersebut sebagai suatu lembaga. Media wanita yang berani menyanggah "wanita" sebagai identitas lembaganya, tercermin dalam isi media tersebut serta bagaimana media tersebut merepresentasikan, menampilkan perempuan dalam isi medianya. Bentuk representasi perempuan inilah yang kemudian akan dipersepsi massa sebagai citra atau *image* media tersebut, secara tidak langsung *image* perempuan yang diciptakan oleh media wanita tersebut akan disandingkan pada *image* media tersebut sebagai media wanita.

Menurut Bennet dalam Eriyanto (2001:36), pemberitaan mengenai perempuan dan cara media merepresentasikan perempuan seperti di atas jelas menunjukkan bahwa, media bukanlah sekadar saluran yang bebas dan netral, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakkannya. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Dalam struktur komunikasi yang sedemikian rupa, suatu medium ruang publik yang seperti media yang diintervensi oleh pelbagai kepentingan jelas tidak bisa bebas dari distorsi. Seluruh kerja

jurnalistik, sebagai penugasan seorang wartawan/reporter, dalam rangkaian proses pencarian, pengumpulan, pemilihan, penulisan, penyuntingan, penempatan pada halaman atau rubrik, bahkan pada pemilihan tipografi, besar atau kecil, jenis, dan warna huruf, dan pemberitaan realitas sosial yang dipilih si wartawan seluruhnya menjadi ajang pertarungan ideologi dan kepentingan yang sebenarnya dikonstruksi oleh hanya segelintir orang. Akhirnya berita, teks, atau diskursus media yang hadir di hadapan khalayak pembaca bukanlah sesuatu yang berdiri netral. Ia menjadi realitas baru, realitas yang sudah dipermak-

Jurnal perempuan adalah salah satu jurnal di Indonesia yang memiliki segmen pasar cukup luas terutama untuk kaum perempuan intelektual dari gejala kelas urban menengah ke atas, bekerja dengan berbagai status dan profesi serta berpendidikan setaraf perguruan tinggi. Jurnal Perempuan terbit pertama kali pada tahun 1996. Kehadiran Jurnal Perempuan pada masa tersebut relatif menjadi spesial di tengah langkanya wacana gender dalam konteks ke-Indonesiaan. Jurnal Perempuan hingga kini telah berada di lebih dari 120 toko buku dan kopma (koperasi mahasiswa) di seluruh Indonesia. Jurnal Perempuan menampilkan berbagai permasalahan seputar perempuan seperti permasalahan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan hingga masalah buruh perempuan.

Penelitian ini lebih diarahkan kepada kritik terhadap artikel "Peraturan Daerah dan Kearifan Terhadap Perempuan" pada rubrik Topik Empu di Jurnal Perempuan edisi 57. Analisis kritis merupakan salah satu metodologi yang sangat tepat untuk mencari tahu bagaimana citra perempuan Minangkabau digambarkan pada teks media serta untuk membongkar nilai-nilai ideologi tertentu yang bersembunyi dibalik sebuah teks media. Sehingga dapat dirumuskan fokus kajian penelitian ini adalah: Bagaimana Representasi Citra Perempuan Minangkabau yang ditampilkan dalam artikel "Peraturan daerah dan Kearifan Terhadap Perempuan" di Jurnal Perempuan edisi 57?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citra perempuan Minangkabau pada level makro (kehidupan sosial masyarakat) dan pada level mikro (teks artikel).

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan cabang ilmu komunikasi. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) maupun elektronik (radio, televisi) yang diproduksi oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen.

Studi Komunikasi massa beranjak dari proses penyampaian pesan dari komunikator dan disalurkan melalui media kepada khalayaknya. Teori awal pada komunikasi massa menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai saluran informasi dan lembaga sosialisasi nilai-nilai yang sifatnya netral. Pandangan ini didasari oleh pandangan kaum positivisme-empiris, wacana dalam media dianggap sebagai wadah ekspresi dari pengalaman manusia dan dinyatakan tanpa ada kendala atau distorsi dengan memakai pernyataan logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris (Eriyanto, 2001: 4)

Dalam perkembangannya, media tidak lagi sekedar berperan mencari, mengumpulkan dan mengeluarkan berita. Lebih jauh, media memiliki peran menentukan pesan-pesan apa yang akan dikeluarkannya, dengan kemasan seperti apa, menentukan segmen pasar yang menjadi khalayak pembaca, dan bebas mengarahkan khalayaknya sesuai dengan ideologi yang dianut media tersebut sebagai lembaga. Dengan ideologi yang dimilikinya yang dapat menentukan pesan bagi khalayak, terlalu naif untuk memandang media sebagai suatu situasi netral. Asumsi ini berkembang dalam studi media massa yang menggunakan paradigma kritis sehingga munculah paradigma kritis dalam memandang media dan menyatakan bahwa media tidak lagi bersifat netral. Media bisa menjadi alat bagi kelompok dominan yang berkuasa untuk menentukan kekuasaannya lebih jauh lagi.

Disinilah persamaan paradigma kritis dengan studi terhadap media massa sehingga munculah paradigma berpikir kritis dalam memandang media. Paradigma kritis juga mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan

reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis paradigma kritis tidak dipusatkan pada kebenaran/ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada konstruktivisme.

Terselipnya kekuasaan dan ideologi tertentu dalam wacana yang diproduksi oleh suatu media memberikan kekuatan pada media tidak saja untuk merefleksikan realita yang ada ditengah masyarakat, tetapi juga menciptakan realita dalam masyarakat itu sendiri. Apabila kondisi yang terefleksikan didukung oleh nilai-nilai yang telah tertanam kuat dalam masyarakat, media sebagai lembaga sosialisasi nilai-nilai atau sistem akan semakin memperkuat keadaan ini. Sistem yang terbentuk dari realitas keadaan masyarakat ini setelah disosialisasikan oleh media akan semakin mengkristal dan akhirnya akan membentuk budaya yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Di sinilah media berperan sebagai pencipta atau pembentuk realita bagi masyarakat khalayaknya.

Tujuan suatu media dimanifestasikan dalam pesan dan produksi makna yang terkandung dalam berbagai ulasan dan rubrik yang disajikan oleh media tersebut. Di sinilah kajian Humas memiliki persambungan dengan kajian kritis mengenai media ini. Media massa sebagai suatu lembaga memiliki citra atau *image* yang direpresentasikan melalui pesan dalam isi media itu sendiri. Representasi suatu gagasan dalam produksi pesan akan mempengaruhi sepenuhnya citra media tersebut sebagai lembaga.

Dalam kerangka inilah kemudian paradigma kritis mengembangkan suatu metode analisis isi media massa yang lebih komprehensif untuk mendapatkan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap media. Metode tersebut dikenal dengan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Metode ini berkembang dari analisis dalam wilayah kebahasaan, yang diadopsi oleh aliran kritis dalam menelaah ideologi yang tersembunyi dalam suatu proses komunikasi melalui pesan media.

Metode analisis wacana kritis, menempatkan penafsiran sosial peneliti untuk melihat bentuk representasi dalam setiap gejala, dalam hal ini media massa berikut teks yang

diproduksinya. Maka, dalam paradigma kritis, penelitian yang bersangkutan tidak bisa menghindari unsur subyektivitas peneliti, dan hal ini bisa membuat perbedaan penafsiran gejala sosial dari peneliti lainnya (Newman, 2000:63-87).

Dalam penelitian ini, analisis wacana kritis yang dilakukan berdasarkan analisis oleh Sara Mills yang menitik beratkan perhatiannya pada masalah feminis dan ketidakadilan gender. Mills menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana suatu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak (Eriyanto, 2001:200).

Selain representasi perempuan, Mills pun menekankan bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks. Posisi-posisi tersebut pada akhirnya menentukan bentuk teks yang hadir di tengah khalayak. Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini mengandung muatan tertentu. Posisi pembaca dalam memaknai suatu wacana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam teori analisis Mills. Menurut Mills, pembaca disebutkan atau disapa tidak langsung (*indirect address*) dimana proses penyapaan tidak langsung ini bekerja dengan dua cara.

Pertama, mediasi. Suatu teks umumnya membawa tingkatan wacana, di mana posisi kebenaran di tempatkan secara hierarkis sehingga pembaca akan mensejajarkan atau mengidentifikasi dirinya sendiri dengan karakter atau apa yang tersaji dalam teks. Teks berita dimaknai di sini sebagai hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Di sini tentu saja bermakna khalayak macam apa yang dimarjinalkan oleh penulis untuk ditulis.

Kedua, kode budaya. Islitah yang diperkenalkan Roland Barthes ini mengacu pada kode atau nilai budaya yang dipakai oleh pembaca ketika menafsirkan suatu teks. Barthes, seperti dikutip Mills, menunjukkan bahwa kode budaya ini dapat ditemukan misalnya, dengan pernyataan: "seperti kita ketahui bersama" atau "kenyataannya" – mensugestikan sejumlah informasi yang di-

percaya dan diakui secara bersama, dianggap sebagai kebenaran bersama. Kode budaya ini membantu pembaca menempatkan dirinya terutama dengan orientasi nilai yang disetujui dan dianggap benar oleh pembaca. Kedua proses itulah yang kemudian membentuk realitas dalam masyarakat melalui produksi makna media.

Paradigma Kritis

Paradigma kritis lahir sebagai kritik terhadap paradigma klasik yang mencakup Positivisme dan Post Positivisme yang menyatakan ilmu penelitian adalah nilai sehingga penelitian bersifat kuantitatif, empiris yang ditandai dengan menggunakan data-data statistik. Menurut paradigma kritis, obyektivitas yang selama ini diagung-agungkan oleh aliran klasik telah menyembunyikan realitas yang sesungguhnya, yaitu kontradiksi sebagai akibat dari sejarah penindasan dan penghisapan.

Paradigma kritis mencoba mengungkap terjadinya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain dalam relasi konfliktual tersebut. Dalam praktiknya, paradigma kritis sering digunakan oleh kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi kepentingan di masyarakat. Paradigma ini banyak berhubungan dengan persoalan komunikasi sebagai subsistem dan sistem kemasyarakatan secara menyeluruh.

Paradigma Kritis bersumber dari pemikiran sekolah Frankfurt. Dari sekolah Frankfurt inilah lahir pemikiran yang berbeda yang kemudian disebut aliran kritis. Pertanyaan utama paradigma kritis adalah adanya kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi. Sesuai dengan referensi berjudul *Ideologi and Communication Theory*, dalam Brenda Dervins et al. (ed), *Rethinking Communication : Paradigm Issues*, Newbury Park, (Sage Publication, 1986:41-43). Ada dua keberatan utama paradigma kritis terhadap pluralis.

Pertama, berhubungan dengan alasan internal, kaitannya dengan sistem komunikasi massa/media itu sendiri. Pandangan positivistik/pluralis itu menyatakan bahwa media haruslah ditempatkan di luar manusia. Pandangan semacam ini tidak dapat dipertahankan

lagi dalam alam komunikasi moderen. Dalam media moderen tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai faktor eksternal, karena dalam praktiknya ia begitu dekat, mendasari kehidupan manusia. Sehingga sukar lagi diberi batasan yang jelas jika dipisahkan. Kedua, berhubungan dengan alasan eksternal yakni relasi dengan sistem yang lebih besar: sosial, politik, struktur ekonomi kedalam formasi sosial secara keseluruhan.

Paradigma kritis dapat dibedakan menjadi dua, yakni paradigma kritis Strukturalis dan paradigma kritis Pasca Strukturalis (Littlejohn, 1997: 393). Paradigma pertama melihat bahwa struktur-struktur sosial yang menindas itu bersifat nyata, meskipun penindasan itu kadang-kadang tersembunyi dari kesadaran kebanyakan orang. Sementara paradigma kritis Pasca Strukturalis melihat tidak ada realitas atau makna sentral. Penindasan yang dilakukan oleh struktur hanya perjuangan ideologi-ideologi tunggal melainkan perjuangan gagasan dan kepentingan yang cair.

Stephen W. Littlejohn dalam Alex Sobur (2001:67) menjelaskan:

“Perkembangan teori komunikasi massa yang didasarkan pada tradisi kritis Eropa (Marxis) cenderung memandang media sebagai alat ideologi kelas dominan. Tradisi Eropa berusaha mematahkan dominasi model komunikasi Amerika yang notabene adalah penganut aliran Laswellian ataupun stimulus-respon, teori yang berasumsi khalayak adalah konsumen pasif media massa. Dengan kata lain, fenomena komunikasi massa bukanlah sekedar sebuah proses yang linear atau sebatas transmisi (pengiriman) pesan kepada khalayak massa, tetapi dalam proses tersebut komunikasi dilihat sebagai produksi dan pertukaran pesan (atau teks) berinteraksi dengan masyarakat yang bertujuan memproduksi makna tertentu”.

Dalam teori kritis pertanyaan yang pertama kali harus diajukan adalah mengenai objektivitas itu sendiri. Menurut Stuart Hall dalam Eriyanto (2001:25), paradigma kritis bukan hanya mengubah pandangan mengenai realitas yang dipandang alamiah oleh kaum pluralis, tetapi juga berargumentasi bahwa

media adalah kunci utama dari sebuah pertarungan kekuasaan. Karena melalui media, nilai-nilai kelompok dominan dimapankan, dibuat berpengaruh, dan menentukan apa yang diinginkan oleh khalayak. Dalam proses pembentukan realitas, Stuart Hall menekankan pada dua titik, yaitu bahasa dan penandaan politik. Penandaan politik disini diartikan sebagai bagaimana praktik sosial dalam membentuk makna, mengontrol, dan menentukan makna. Media berperan dalam menandakan peristiwa atau realitas dalam pandangan tertentu, dan menunjukkan bagaimana kekuasaan ideologi berperan, karena ideologi menjadi bidang di mana pertarungan dari kelompok yang ada dalam masyarakat.

Representasi

Istilah representasi merujuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua hal penting dalam representasi. Pertama, apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya. Ini mengacu pada apakah seseorang, kelompok itu diberitakan apa adanya atau diburukkan. Penggambaran yang tampil bisa jadi adalah penggambaran yang buruk atau bisa jadi memarjinalkan kelompok tertentu. Disini, hanya citra yang buruk saja ditampilkan, sementara citra yang baik luput dari pemberitaan. Kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan. Dengan kata lain, kalimat, aksentuasi, dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan dalam pemberitaan kepada khalayak.

Persoalan utama dalam representasi adalah bagaimana realitas atau objek tersebut ditampilkan. Menurut Jhon Fiske, paling tidak ada tiga proses dalam menampilkan objek, peristiwa, gagasan, kelompok, atau seseorang. Pada level pertama adalah peristiwa yang ditandai sebagai realitas. Umumnya berhubungan dengan aspek pakaian, lingkungan, ucapan, dan ekspresi. Pada level kedua, ketika kita memandang sesuatu sebagai realitas dan bagaimana realitas itu digambarkan. Digunakan perangkat secara teknis, misalnya kata atau kalimat. Ini membawa makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Pada level ketiga,

bagaimana peristiwa tersebut diorganisir kedalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis. Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan diorganisasikan kedalam koherensi sosial seperti kelas sosial atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat (Jhon Fiske dalam Eriyanto, 2001 : 113)

Salah seorang yang perhatian para representasi wanita adalah Sara Mills. Bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto, ataupun dalam berita. Oleh karena itu, apa yang dilakukannya sering juga disebut sebagai perspektif feminis. Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan.

Posisi subjek dan objek dalam representasi mengandung muatan ideologis tertentu. Dalam hal ini bagaimana posisi tersebut turut memarjinalkan posisi perempuan ketika ditampilkan dalam pemberitaan. Menurut Sara Mills, teks adalah suatu hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, pembaca tidaklah dianggap semata sebagai pihak yang hanya menerima teks, tetapi juga ikut melakukan transaksi sebagaimana akan terlihat dalam teks. Dari berbagai posisi yang ditempatkan kepada pembaca, Mills memusatkan perhatian pada gender dan posisi pembaca (Mills dalam Eriyanto, 2001 :114)

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi, wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.

Istilah kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:2) mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang bertentangan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, peneliti harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu, peneliti mulai mencatat atau menghitung dari satu, dua, tiga, hingga seterusnya.

Peneliti menggunakan kerangka analisis Sara Mills, yang membagi analisis menjadi dua tingkatan, yaitu pada level makro/ sosial dan pada level mikro/teks. Berikut pemaparannya:

1. Analisis Pada Level Makro/Sosial

Mengkaji wacana tentang perempuan Minangkabau, kedudukan dan peranannya dalam masyarakat di Sumatera Barat. Sesuai dengan uraian makro sebelumnya, analisis pada level ini akan mencari tahu makna global/secara umum dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Pada penelitian ini, teks artikel mengangkat tema mengenai perempuan minangkabau, maka analisis level mikro akan dilakukan pada kehidupan sosial perempuan minangkabau baik dalam adat maupun masa kini. Analisis ini akan mempertanyakan bagaimana teks mencerminkan kekuatan sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Bagaimana teks memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik ideologi sosial dan budaya yang tercipta dalam masyarakat.

2. Analisis Pada Level Mikro/ Teks

Analisis pada level ini, Pertama akan dilihat posisi subjek dan objek penceritaan dalam teks. Penempatan posisi ini akan menentukan struktur teks dan bagaimana makna diperoleh dalam teks secara keseluruhan. Pada analisis ini juga akan dilihat posisi penulis dan pembaca dalam teks. Bagaimana penulis melakukan penyapaan langsung maupun tidak langsung melalui mediasi dan kode budaya. Selain itu akan dilihat penempatan posisi pembaca melalui penempatan aktor yang menjadi pembaca dominan dan penafsiran teks oleh pembaca. Analisis pada teks artikel "peraturan daerah dan kearifan terhadap perempuan" di Jurnal perempuan ini dilakukan untuk melihat representasi citra perempuan Minangkabau dalam teks yang juga

akan didasarkan pada level makro. Pada level ini, peneliti akan menggunakan uraian semantik, dan retorik dalam melakukan analisis. Peneliti akan melihat bagaimana teks ditampilkan secara semantik, makna yang ingin ditekankan dalam teks berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pada Level Makro/Kehidupan Sosial

Membicarakan masalah etnis Minangkabau memang menarik. Salah satu suku yang berada di barat pulau sumatera ini berbeda dari suku-suku lain di Indonesia. Masyarakat Minangkabau mayoritas beragama islam, bahkan ada pameo yang mengatakan islam adalah minang, kalau tidak islam, berarti bukan minang. Mayoritas masyarakat yang beragama islam terlihat juga dari falsafah yang digunakannya, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Masyarakat minangkabau juga terkenal dengan makanannya dan tentu saja garis keturunan matrilinealnya. Dimana penarikan garis keturunan berdasarkan garis ibu. Inilah salah satu kelebihan perempuan Minangkabau dibanding perempuan lain di Indonesia. Matrilineal dalam adat minangkabau tidak sekedar sistem kekerabatan saja, tetapi juga matriakhat yang berarti kekuasaan berada pada perempuan.

Perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan adat minangkabau. Dalam ajaran adat minangkabau ditanamkan rasa hormat dan memuliakan perempuan sebagai keagungan di dalam hidup berkaum dan berkeluarga yang menjadi lambang keturunan di Minangkabau yang disebut juga dengan Matrilineal. Gambaran perempuan minangkabau dalam adat melambangkan kemandirian, ketangguhan, dan tidak mau bergantung pada sumai. Istilah *bundo kanduang* pun diberikan kepada perempuan di minangkabau. Berbagai pujian serta penghormatan yang terlihat dari ungkapan-ungkapan Minangkabau. Perempuan Minangkabau dilambangkan sebagai *limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi, dsb*. Ungkapan tersebut berarti perempuan Minangkabau adalah orang terpenting dalam rumah gadang yang merupakan rumah adat, kedudukannya dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Kalau dilihat berdasarkan adat, posisi

perempuan minangkabau dinilai “superior” lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan lainnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan gerakan feminisme yang memperjuangkan hak perempuan. Bila dilihat dari adat, isu-isu kesetaraan dan ketidakadilan gender tidak relevan dibicarakan di minangkabau, karena tidak ada subordinasi perempuan disana, yang ada malahan subordinasi laki-laki. Namun, bila ditelaah lebih lanjut dan bersikap kritis terhadap keadaan masyarakat Minangkabau, perempuan minangkabau dan masyarakatnya terbuai dengan “posisi imajinasi” yang menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi dengan segala simbol dan atribut yang disandangkan kepada mereka.

Menurut Hayati Nizar, pengamat masalah perempuan di Padang dalam melayu online, masyarakat minangkabau meski menganut sistem matrilineal, sistem kekuasaannya tidak matriakhal. Kekuasaan formal baik tradisional maupun modern tetap dipegang oleh laki-laki³. Kalau dilihat dari paparan peneliti sebelumnya, mayoritas perempuan minangkabau terlena dengan sistem adat yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan masa kini di Sumatera Barat, sistem matrilineal tidak berjalan sesuai fungsi awalnya, walaupun begitu tidak ada perempuan minangkabau yang membantahnya. Hal ini dapat terlihat dari keadaan Sumatera Barat, tempat dimana masyarakat minangkabau berasal saat ini sedang “banjir” perda syariat. Rata-rata perda itu ditujukan kepada perempuan, dimana cara berpakaian dan ruang gerak ditentukan oleh perda. Meski begitu, perempuan minangkabau menerima saja.

Hayati nizar melakukan analisis terhadap adat budaya minangkabau, dilukiskan, mamak (saudara laki-laki ibu) menjadi pemimpin dalam rumah tangga wilayah rumah tangga saparuik (satu perut, satu ibu). Datuak menjadi pemimpin dalam wilayah kaumnya (satu nenek). Penghulu menjadi pemimpin suku (satu nenek moyang) dalam sebuah wilayah. Kesemua nama di atas adalah dipegang oleh laki-laki, hanya diberikan nama dari garis ibu. Harta pusaka tinggi yang dalam adat Minang-

kabau menjadi hak dan kekuasaan perempuan sering kali tidak berlaku efektif. Hayati nizar menggambarkan kekuasaan dan intervensi mamak sangat kuat dalam mengambil keputusan harta pusaka tinggi.

Kalau dilihat dari pemaparan diatas, fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau sesungguhnya tidak memiliki kontrol terhadap sumber daya seperti tanah dan hatra pusaka tinggi lainnya. Tak heran jika saat ini, banyak perempuan Minangkabau yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Peran *bundokandung* juga tidak lepas dari sorotan Hayati Nizar. Ia merujuk dari pandangan sejarawan taufik abdullah yang cenderung bertolak belakang dengan posisi *bundo kanduang* pada masyarakat Minangkabau. *Bundo kanduang* dinilai tidak memiliki peranan dalam pengambilan keputusan, karena *bundo kanduang* dinilai bukanlah orang yang memegang jabatan resmi dalam hierarki kekuasaan dalam sistem politik minangkabau. Merujuk dari pandangan taufik abdullah, tidak heran jika perempuan minangkabau hanya menerima perda yang jelas-jelas diberlakukan untuk mereka saat ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan sebelumnya, gambaran perempuan minangkabau dalam kehidupan sosial masih termarginalkan. Perempuan minangkabau terbuai dan terlena dengan simbol-simbol adat yang diberikan kepadanya. Sehingga membuat perempuan minangkabau juga terlena dengan perda yang ditujukan pada mereka. Walaupun pada kenyataannya, mereka menyadari bahwa perda membuat ruang gerak perempuan tidak bebas, namun tetap dijalankan. Selain itu, adat dan agama mengungkung kebebasan perempuan Minangkabau dan diikat dalam badan hukum. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, adat tidak mewajibkan perempuan minangkabau bmengekan jilbab. Fenomena perempuan Minangkabau dalam kehidupan sosial menggeser fungsi feminisme yang ada. Kesinergian misi gerakan feminisme dengan adat yang ada pada awalnya bergeser menjadi kebutuhan yang harus dipahami oleh perempuan Minangkabau, sehingga perempuan Minangkabau mampu melihat suatu keadaan lebih dalam lagi.

Ketika adat diciptakan, pada hakikatnya ia merupakan suatu hasil daya pikir dan budaya

³ Sumber: <http://74.125.153.132/search?q=cache:Z-fPuVI3pXAJ:melayuonline.com/article/%3Fa%3DSEZOL2VORw%253D%253D%3D+perempuan+minangkabau+masa+kini&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id>

masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan pemajuan harkat manusia. Dibawah atap minangkabau, seharusnya proses dehumanisasi warga minangkabau terpenuhi. Terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak minangkabau karena adat merupakan tempat berlindung atau benteng yang sesuai bagi mereka untuk tumbuh dan surga untuk merealisasikan kebebasan dan hak-hak azazi mereka

Analisis Pada Level Mikro / Teks Artikel

Posisi Subjek – Objek Pencerita

Dari analisis posisi subjek-objek, pada akhirnya akan menentukan bentuk teks yang hadir di tengah khalayak. Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini mengandung muatan ideologi tertentu. Dalam hal ini bagaimana posisi turut memarjinalkan salah satu dari posisi kelompok tertentu ketika ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001 : 201 – 202).

Dalam artikel ini, perempuan Minangkabau ditempatkan atau diposisikan sebagai objek, karena kalimat-kalimat dalam teks artikel ini banyak menggunakan kalimat pasif. Dalam kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat pasif, seseorang menjadi objek dari pernyataan. Bentuk kalimat ini menentukan apakah subjek diekspresikan secara eksplisit atau implisit dalam teks. Kalimat aktif umumnya digunakan agar seseorang menjadi subjek dari tanggapannya, sebaliknya kalimat pasif menempatkan seseorang sebagai objek (Eriyanto, 2001: 251 – 252)

Penempatan perempuan Minangkabau sebagai objek dapat terbaca pada teks dalam kalimat berikut:

Setiap perempuan dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-

Setiap perempuan dalam kalimat di atas diposisikan sebagai objek, walaupun ditempatkan sebelum prediket, karena pernyataan tersebut merupakan kalimat pasif. Prediket dalam kalimat tersebut merupakan prediket pasif. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam buku bahasa Indonesia, tim dosen bahasa

Indonesia UPT Bidang Studi Unpad, ciri-ciri yang dimiliki oleh objek dalam kalimat bahasa Indonesia adalah salah satunya, dapat menjadi subjek kalimat pasif. (2006, 54 – 55). Dengan membentuk kalimat pasif, titik perhatian yang ingin di komunikasikan kepada khalayak adalah pada diri objek, bukan subjek. (Eriyanto, 2001 : 154).

Kalimat dalam kolom diatas yang terdapat dalam artikel memperlihatkan alangkah malangnya setiap perempuan Minangkabau harus diatur cara berpakaian karena dianggap tubuhnya dapat merangsang nafsu birahi laki-laki.

Pada kalimat lain dalam artikel:

Dalam kalimat tersebut, kata mereka ditunjukkan kepada perempuan Minangkabau yang tertangkap dan dibawa ke kantor satpol PP. kata “kelimanya”, merupakan nominal atau jumlah dimana bahwasanya ada 5 orang yang tertangkap. Kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. prediket “dibawa dan dipaksa” menunjukkan hal itu. Pelengkap dan keterangan dalam kalimat ini menerangkan semakin tersudutnya perempuan Minangkabau, kata ditangkap pada depan kalimat merupakan penegasan penyudutan perempuan Minangkabau. Kata ditangkap berarti konotasi negatif, dimana diartikan sebagai paksaan.

Dalam artikel ini, penulis lebih cenderung menggunakan kalimat-kalimat pasif. Kalimat-kalimat di atas merupakan bentuk kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, subjek (pelaku) ditempatkan pada posisinya sebagai objek. Sebaliknya objek ditempatkan sebagai subjek (sasaran). Bentuk kalimat pasif mengubah subjek pelaku (dalam kalimat aktif) hanya sebagai keterangan belaka. Dalam kalimat aktif, yang ditekankan adalah subjek pelaku dari suatu kegiatan, sedangkan dalam kalimat pasif yang ditekankan adalah sasaran dari suatu pelaku atau tindakan. Dalam kalimat pasif, kehadiran pelaku tidak penting, bisa hadir, bisa dihilangkan, karena objek yang paling penting. Dalam kalimat yang berstruktur pasif, pelaku hanya sebagai tambahan keterangan yang menjadi sentral adalah sasaran (yang dikenai) (Eriyanto, 2001 : 158).

Jika kalimat-kalimat dalam artikel ini ditelaah, akan dapat terbaca dan terlihat:

...seluruh siswi-siswi sekolah negeri di Sumatera Barat diwajibkan berbusana muslimah
 S (Sasaran) P O

“Seluruh siswi-siswi” ditempatkan pada posisi sebagai subjek sasaran, “diwajibkan” merupakan prediket dalam kalimat di atas, “berbusana muslimah” adalah objek. Seluruh siswi-siswi mengarah pada perempuan Minangkabau di Sumatera Barat sebagai objek. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. berbusana muslimah merupakan pelengkap dari kalimat, dimana mempertegas kewajiban dalam berbusana berdasarkan cara berpakaian perempuan dalam Islam, terlihat dalam kata terakhir, “muslimah”. Jika dilihat, kalimat diatas menempatkan perempuan Minangkabau dalam struktur kalimat sebagai subjek. Pada kenyataannya, subjek yang dikenakan atau subjek sasaran yang berarti objek dalam kalimat aktif. Kata “diwajibkan” yang menjadi prediket dalam kalimat tersebut merupakan prediket pasif, sedangkan busana muslimah yang menjadi objek hanya merupakan objek pelengkap yang ingin mempertegas kewajiban yang harus dilakukan perempuan Minangkabau.

Kalimat tersebut jelas ditujukan bagi perempuan Minangkabau sebagai objek dalam kalimat aktif. Jika kalimat tersebut diubah kedalam bentuk kalimat aktif, maka akan semakin jelas.

Berbusana muslimah mewajibkan seluruh siswi-siswi sekolah negeri di Sumatera Barat
 S (pelaku) P O

Dalam kalimat diatas, perempuan Minangkabau jelas dijadikan objek dari berbusana muslimah. Namun, subjek sebenarnya dalam kalimat diatas disamarkan. Busana muslimah lebih tepatnya merupakan keterangan dari kewajiban yang harus dilakukan perempuan Minangkabau.

Pada kalimat lainnya dalam teks artikel:

Perempuan itu diinterogasi, disuruh mempraktikan cara menggoda laki-laki...
 S (Sasaran) P Ket.

Kalimat diatas merupakan kalimat pasif, dimana perempuan menjadi subjek sasaran yang berfungsi sebagai objek. Kalimat diatas tidak

dapat diubah kedalam bentuk aktif. Karena, objek dari kalimat diatas tidak ada, yang ada hanya keterangan dari pernyataan yang menunjukkan bahwasanya perempuan Minangkabau dipaksa oleh aparat untuk melakukan pekerjaan yang tidak dilakukannya. Kata “diinterogasi” biasanya digunakan oleh aparat keamanan untuk menanyakan dan memaksa seseorang. Namun, kata aparat yang sebenarnya menjadi subjek pelaku tidak ditampilkan dalam teks, alias dihilangkan.

Meskipun dalam artikel ini banyak menggunakan kalimat pasif. Namun juga ada kalimat aktif, dimana dalam kalimat itu jelas menunjukkan siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek sebenarnya dalam teks artikel ini. Berikut adalah kalimat aktif yang ada dalam artikel ini:

Dan yang memprihatinkan, dalam pengiriman ke panti, salah seorang pol PP melakukan pelecehan seksual meletakkan tangan pada paha korban

Dalam kalimat diatas yang merupakan bentuk kalimat aktif, jelas terlihat bahwasanya seorang pol PP menjadi subjek pencerita yang mana melakukan pekerjaan pelecehan seksual kepada korban, yang menjadi objek pencerita, korban ditujukan kepada perempuan Minangkabau. Dalam kalimat diatas, pelecehan terhadap perempuan Minangkabau yang dilakukan oleh pol PP digambarkan secara jelas. Pada awal kalimat, situasi keadaan, tempat, serta keterangan apa yang dilakuka pol pp terbaca dalam kalimat diatas. Penggambaran secara detail latar yang memperlihatkan betapa perempuan Minangkabau pada saat itu benar-benar direndahkan oleh aparat keamanan.

Perempuan diposisikan sebagai manusia yang harus membatasi gerak-geriknya, cara berbusana dan aksesnya, khususnya di malam hari, untuk menghindari anggapan mereka pelacur.

Kalimat-kalimat dalam artikel ini yang banyak menggunakan kalimat pasif, membuat subjek sebenarnya dalam artikel agak sulit ditentukan. Subjek (pelaku) banyak disamarkan. Namun, dari kalimat-kalimat yang penulis paparkan, subjek pelaku adalah aparat keamanan yang sebenarnya merupakan bagian dari pemerintah daerah setempat yang membuat Undang-Undang. Hal ini semakin jelas terbaca pada:

Jangan-jangan nanti pemerintah karena di daerah akan menyusun Perda wajib tinggal di mesjid bagi perempuan karena dirumah juga tidak aman!

Dari kalimat-kalimat di atas, terlihat bahwa Pemerintah Daerah menjadi subjek pelaku dari teks artikel ini. Kewajiban yang diberikan kepada perempuan Minangkabau dengan seringnya kata “harus” diulang menunjukkan penekanan yang memberikan pengertian bahwasanya perempuan disubordinatkan. Hal ini semakin jelas, dengan kata “pelacur” yang ditujukan kepada perempuan. Pada dua kalimat terakhir di atas, diarahkan kepada subjek dari penceritaan. Dimana, kata “pemerintah daerah” selaku pembuat Perda dimunculkan dalam kalimat retorik tersebut.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan penulis artikel. Dalam hasil wawancara, penulis artikel menempatkan pemerintah sebagai subjek dan perempuan minangkabau sebagai objek dalam teks artikel. Hal ini sesuai dengan analisis yang peneliti lakukan pada posisi subjek – objek penceritaan pada level mikro dengan menggunakan semantik. Berikut kutipan wawancara peneliti dan penulis artikel:

“Dalam artikel ini, saya menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek dan perempuan Minangkabau sebagai objek. Hal ini keran terkait dengan peraturan daerah yang dibuat, dimana ditujukan kepada perempuan dan dibuat oleh pemerintah. Artikel ini juga bisa ada kan berdasarkan keadaan perempuan Minangkabau yang termarginalkan oleh Perda. Berdasarkan curhat perempuan-perempuan yang menjadi korban salah tangkap”⁴.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa peneliti memiliki kesamaan analisis posisi subjek dan objek pencerita yang peneliti lakukan berdasarkan pada level mikro atau analisis teks artikel dengan subjek-objek yang memang ingin ditampilkan oleh penulis dalam artikel ini.

Dalam menuliskan berita atau editor melakukan penyapaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa dalam proses pro-

duksi teks terjadi negosiasi antara penulis dan pembaca. Proses analisis posisi penulis – pembaca ini melalui dua tahap yaitu mediasi dan kode budaya. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Proses Penyapaan

1. Mediasi

Suatu teks biasanya membawa tingkatan wacana dimana posisi kebenaran ditempatkan secara hierarki sehingga pembaca akan mensejajarkan atau mengidentifikasi diri sendiri dengan karakter atau apa yang terjadi di dalam teks. Penulis lebih banyak bercerita, seolah penulis dalam artikel ini hanya menjadi pemain tunggal.

Penelitian penulis selama lebih kurang tujuh bulan, menemukan di Sumatera Barat, paling tidak terdapat 12 Perda senada, juga beberapa instruksi Bupati / Walikota.

Paragraf 1

Tulisan dalam artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal tersebut dapat terlihat pada penggalan kata yang digaris bawah. Penulis ingin menegaskan kepada pembaca dan subjek pelaku yang ada dalam artikel ini bahwa ini bukan opini semata, tapi penelitian yang telah dilakukan selama tujuh bulan lamanya. Walaupun dalam artikel ini pembaca tidak disapa secara langsung, tapi jelas sekali penulis ingin menggiring pembaca untuk dapat menyetujui hasil penelitiannya. Dalam artikel ini, penulis ingin memberitahukan pembaca, bahwa ia terlibat secara langsung dalam peristiwa, sehingga datanya valid dan pembaca diharapkan dapat percaya dan meyakini itu benar adanya.

Konsideran Perda di atas, meminjam bahasa Lili Zakiah Munir, membuat semakin sulit menjadi perempuan muslim di Indonesia.

Untuk mempertegas bahawasanya tulisan penulis bukan opini semata, penulis meminjam kata-kata orang lain yang dirasa ahli dalam masalah ini. Penulis menggunakan kata “meminjam bahasa”. Dengan meminjam bahasa orang lain, penulis ingin menguatkan hasil penelitiannya, memberitahukan bahwa penelitiannya itu benar adanya. Bahawasanya Perda membuat sulit menjadi perempuan yang baik di Sumatera Barat. Penulis berusaha netral

⁴ Sumber: wawancara dengan penulis artikel, bapak Sudarto

dalam artikel, namun tetap ingin menggiring pikiran pembaca untuk setuju dengan isi artikel ini.

Keinginan penulis untuk mendoktrin pembaca semakin jelas dalam paragraf berikutnya. Dimana, pada penggalan kata yang digarisbawahi menunjukkan seakan-akan penulis mengatakan Perda-Perda yang bernasalah. Penulis ingin menampilkan Perda tersebut dengan mengguankan kata “sebut”, namun penulis seolah juga ingin mempertahankan posisinya yang netral dengan menggunakan kata “misal”. Hal ini menyiratkan bahwa penulis tidak ingin menggiring pembaca, tapi biar pembaca yang menafsirkan sendiri, yang pasti penulis memaparkan contoh-contoh Perda yang salah.

Semua ditampilkan dari perspektif penulis. Kata yang digarisbawahi pada kalimat diatas menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi, diceritakan kembali oleh orang lain, disini diceritakan oleh penulis. “perempuan itu” ditujukan kepada korban. Penulis juga menggambarkan latar kejadian serta menggambarkan kembali kronologis kejadian yang diceritakan oleh perempuan. Namun, dari penceritaan kembali yang dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa penulis memihak kepada korban. Penulispun berusaha memberitahukan kepada pembaca dengan menggambarkan detail apa yang menimpa korban, betapa menderita korban tersebut. Dia tidak bersalah, namun masih ditangkap. Penulis juga seolah ingin mengajak pembaca untuk dapat menyalahkan kinerja aparat.

Melihat bagaimana cara penulis menyampaikannya pesan kepada pembaca, terlihat bahwasanya penulis tidak bersifat netral. Walaupun, penulis berusaha menutupinya dengan memaparkan apa yang terjadi. Namun, paparan yang dilakukan penulis cenderung menyudutkan satu tokoh dan mengangkat tokoh lain dalam penceritaan. Penulis terlihat berpihak kepada perempuan Minangkabau sebagai objek, namun gambaran-gambaran perempuan Minangkabau yang ditampilkan adalah perempuan-perempuan yang termarginalkan. Penulis seolah ingin mengajak pembaca untuk berempati dengan yang dirasakan perempuan Minangkabau akibat Perda yang bias *syari’at*.

2. Kode Budaya

Kode Budaya menurut Roland Barthes mengacu pada kode atau nilai budaya yang dipakai oleh pembaca ketika menafsirkan teks. Kode budaya ini membantu pembaca menempatkan dirinya terutama dengan orientasi nilai yang disetujui dan dianggap benar oleh pembaca. (Eriyanto, 2001: 203)

Kode budaya dalam artikel ini terdapat dalam kalimat:

Menulis memaparkan ungkapan adat dari daerah Sumatera Barat dengan menggunakan istilah :istilah “*the land of Minangkabau*”.

..., ungkapan Sumatera Barat *the land of Minangkabau* dengan falsafah adat *basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*.

Paragraf 1

Kalimat di atas, lagi-lagi menunjukkan bahwa ia sedang melakukan investigasi salah seorang perempuan Minangkabau yang menjadi korban dari salahnya implementasi Perda. Penulis seolah ingin mengajak pembaca secara tidak langsung untuk membayangkan apa yang sedang terjadi. Penulis seakan ingin pembaca dapat membayangkan bahwa pembaca adalah penulis yang sedang melakukan investigasi.

Perempuan itu pulang kira-kira pukul sepuluh malam. Karena tidak ada lagi angkutan umum, ia menumpang mobil sayur yang menuju pasar. Ditengah perjalanan, mobil dihentikan polisi dengan alasan melakukan razia senjata tajam. Tapi ketika melihat di mobil ada perempuan, target operasi berubah menjadi penangkapan perempuan tersebut. Dengan tuduhan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Paragraf 7

Kalimat di atas merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh penulis. Walau penulis melakukan investigasi langsung kepada korban, namun apa yang terjadi tidak diceritakan langsung oleh mulut korban. Dalam artikel ini, tidak ada dialog yang dimunculkan.

Istilah tersebut menunjukkan bahwa daerah Sumatera Barat adalah Minangkabau. Dengan pemaparan tersebut, membuat orang-orang tidak merasa aneh lagi ketika melakukan, memikirkan, dan mengasumsikan sesuatu hal. Istilah “*the land*” dibarengi dengan “falsafah *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” bila disatukan memberikan arti bahwa hal tersebut sudah sangat lumrah dan pasti diketahui oleh masyarakat sehingga pembaca tidak perlu berpikir panjang untuk menafsirkan maksud yang disampaikan penulis. Pembaca dapat langsung mengira bahwasanya Perda yang ada di daerah tersebut berdasarkan falsafah atau adat lokal setempat.

Kalaupun harus keluar rumah, mereka harus membungkus diri sedemikian rupa agar lawan jenis yang melihatnya tidak *clamitan*.

Paragraf 2

Penulis di dalam artikel ini banyak menggunakan istilah-istilah dari daerah-daerah yang dirasa telah diketahui oleh masyarakat secara umum. Misalnya dalam kalimat diatas, penulis menuliskan istilah “*clamitan*” yang dalam artikel ini berkonotasi negatif, dimana perempuan harus membungkus diri dengan pakaian agar laki-laki tidak menggonggonya. Kata laki-laki pun diganti lawan jenis oleh penulis, dimana sebelumnya perempuan telah dituliskan secara jelas, jadi ketika penulis menuliskan lawan jenis, pembacapun dapat menginterpretasikannya kepada laki-laki yang merupakan lawan jenis perempuan.

Kata “*konco wingking*” berasal dari bahasa jawa yang ditujukan kepada perempuan yang berarti bahawa perempuan adalah *the second person*, yaitu hanyalah pelengkap laki-laki yang tunduk pada laki-laki. Kata ini dirasa penulis diketahui semua orang, makanya penulis mengguankan istilah ini. Namun, penulis sepertinya juga sadar bahwa tak semua orang tahu makna sesungguhnya dari kata ini. Maka, untuk menghindari terjadinya salah persepsi antara penulis dan pembaca nantinya, penulis menerjemahkan langsung “*konco wingking*” yang dimaksudnya dalam artikel ini, yaitu setelah kata tersebut ada penjelasan,

yang harus ikut apa mau laki-laki dan tidak boleh menolak. Kata laki-laki dimunculkan, yang berarti *konco wingking* ditujukan kepada perempuan.

..., biasanya perempuan pihak yang paling rentan / potensi menjadi sasaran berbagai aksi –aksi pelanggaran dan kekerasan oleh kelompok “*polisi-polisi moral*” maupun aparat: *disweeping*, dirazia untuk diperas, ditahan dan diperlakukan dengan cara yang dapat dikategorikan pelecehan seksual atas perempuan itu sendiri.

Paragraf 4

Selain istilah-istilah dari daerah-daerah, penulis juga menggunakan istilah “*polisi-polisi moral*”. Penulis tidak menerangkan siapa polisi-polisi moral yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut. Namun, penulis menerangkan dengan siapa polisi-polisi moral tersebut bekerja, yaitu aparat. Kata setelah polisi-polisi moral, maupun memberikan interpretasi makna bahwa bersamaan. Jadi polisi-polisi moral dan aparat digambarkan penulis bersama melakukan pendiskriminasian terhadap perempuan. Jika ditelaah lebih dalam lagi, istilah tersebut diperuntukkan kepada pemerintah daerah yang membuat peraturan daerah. Disini, penulis mengukuhkan dan ingin menyampaikan kepada pembaca gambaran pendiskriminasian perempuan. perempuan Minangkabau digambarkan termarginalkan karena Perda. Namun, penulis tidak secara langsung menunjukan tulisannya kepada pemerintah, penulis mengganti istilah pemerintah dengan istilah-istilah yang dirasa umum dan dikenal masyarakat seperti istilah ini.

Dalam kalimat yang digarisbawahi diatas, penulis mengidentifikasi keadaan sekarang yang ada. Penulis mengukuhkan perempuanlah yang terdiskriminasi oleh kehidupan dan keadaan yang ada. Pembaca dalam kalimat ini diajak untuk melihat realitas yang ada. Seolah-olah penulis ingin mengatakan. Ayo lihat keadaan sekarang, perempuan itu tertindas. Dalam kondisi seperti ini, dimaksudkan dalam kondisi dimana Perda diberlakukan, ternyata perempuan malah tertindas.

Pada kalimat diatas, penulis sepertinya ingin memberitahukan apa yang terjadi saat ini dengan keadaan perempuan di masyarakat Arab. Kata dimitoskan dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang sudah mengakar atau sesuatu yang sudah lama dipegang oleh suatu daerah. Dalam artikel ini, penulis ingin memberitahukan kepada pembaca dan semakin memperkuat bahwa keadaan perempuan Minangkabau yang terjadi akibat Perda bias *syari'at* disamakan dengan keadaan perempuan Arab. Asumsinya adalah Arab merupakan negara yang mengukuhkan hukum Islam, maka penulis menggambarkan Perda berakar dari sana. Kata dimitoskan diikuti dengan kalimat pelengkap penderita keinginan syahwat laki-laki yang jelas menginterpretasikan pendiskriminasian terhadap perempuan. penyamaan kondisi Arab dengan perempuan Minangkabau akibat Perda.

Dalam artikel ini penulis berusaha menutuni kehernihakannya, seolah penulis bersifat .., bagaimana perempuan yang saat itu dalam masyarakat Arab dimitoskan sebagai "pelengkap penderita" keinginan syahwat laki-laki, ... menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan Minangkabau. Walaupun begitu, perempuan Minangkabau digambarkan tertindas dan termarjinalkan. Perempuan Minangkabau seolah tertipu oleh Perda yang dibuat pemerintah yang ditujukan kepadanya. Keberpihakan penulis dapat terbaca pada :

1. Berbagai kebijakan pemerintah daerah bernuansa agama dikeluarkan secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengontrol dan mengekang gerak perempuan.
2. Perempuan dicitrakan (kembali) sebagai penggoda dan sumber maksiat sehingga harus ditutup rapat dan dilarang keluar rumah.

Paragraf 2

1. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan, seluruh siswi-siswi negeri di Sumatera Barat diwajibkan berbusana "muslimah".
2. Bahkan sebuah SMU Negeri di Painan Pesisir Selatan, mewajibkan siswi-siswinya sholat sholat Dzuhur berjamaah setiap hari sekolah.

Paragraf 9

Kalimat-kalimat diatas jelas menunjukkan keberpihakan penulis dan keinginan penulis untuk mendoktrin pembaca sesuai dengan yang ia pikirkan. Banyaknya kata "harus" yang digunakan dalam artikel ini yang ditujukan kepada perempuan Minangkabau mengidentifikasikan bahwa perempuan Minangkabau dipaksa untuk melakukan sesuatu walau itu tidak diinginkan. Kata "harus" juga dapat diartikan keadaan perempuan Minangkabau yang tidak dapat mengekspresikan keinginannya. Perempuan seolah dianggap robot yang mesti patuh pada yang menggerakannya.

Pada kalimat-kalimat di atas juga terdapat, kalimat yang merupakan hasil interview penulis dengan korban. Namun, hasil interview tersebut tidak diceritakan langsung oleh korban, disini Perempuan Minangkabau. Hasilnya, diceritakan kembali oleh penulis dengan sejelas-jelasnya menggambarkan latar kejadian dan apa yang terjadi. Begitupun cerita hasil penangkapan pedagang kaki lima. Perempuan yang diceritakan, tidak menceritakan dirinya sendiri. Keadaan perempuan yang tersubordinatkan ditampilkan penulis dengan menekankan kalimat setelah penceritaan penangkapan pedagang kaki lima di jalan *By Pass* Padang dengan mengatakan padahal mereka melakoni profesi itu untuk menghidupi keluarga yang tidak diceraikan suami. Mereka yang dimaksud adalah perempuan Minangkabau yang bukannya tidak mau mematuhi Perda, namun harus bekerja untuk keluarga, seolah hanya perempuanlah yang mencari makan.

Di akhir teks artikel, penulis menutup dengan mempertegas kata-katanya menggunakan tanda seru (!). pada akhir, jelas penulis berpihak pada perempuan karena mengatakan jangan-jangan pemerintah akan akan membuat Perda wajib tinggal di mesjid. Kata jangan-jangan merupakan opini dari penulis, kata "mesjid" dipilih, karena penulis daerah Minangkabau yang mayoritas beragama Islam dan Perda disinyalir mengacu pada ajaran agama Islam.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil setelah melakukan analisis pada penelitian ini adalah: Pada analisis makro, peneliti menemukan bahwa masyarakat Minangkabau, terutama perempuan minangkabau yang masih berdomisili di Sumatera Barat masih kuat memegang adat dan agama islam. Bahkan pada keadaan masa kini, mayoritas perempuan Minangkabau hanya menurut pada Peraturan Daerah yang melegitimasi adat dan agama.

Pada analisis mikro peneliti menemukan bahwa *Jurnal Perempuan* berpihak pada perempuan Minangkabau dan menyudutkan pihak-pihak yang membuat Peraturan Daerah mengenai perempuan di Sumatera Barat. Namun, *Jurnal Perempuan* dalam keberpihakannya menampilkan perempuan Minangkabau sebagai objek penceritaan dalam teks artikel. Sementara pemerintah daerah sebagai pembuat peraturan ditempatkan sebagai subjek penceritaan. Penuturan dalam teks sepenuhnya mengikuti pandangan penulis, bahkan semua peristiwa hanya diceritakan oleh penulis artikel. Penyapaan yang dilakukan oleh penulis artikel kepada pembaca dalam teks artikel ini secara tidak langsung. Tokoh – tokoh yang ditampilkan dalam teks artikel ini diberi ruang yang sedikit untuk menampilkan diri dan gagasannya sendiri dalam teks.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Ardianto, Elvinaro dan Komala, Lukiati. 2005. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Ardianto, Elvinaro dan Q. Anees, Bambang. 2007. *Filsafat Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Idy Subandy dan Hanif Suranto. 1998. *Wanita, Media, Mitos dan Kekuasaan – Mosaik Emansipasi dalam Ruang Publik yang Robek (Pengantar Ed) dalam Idy Syhandi Ibrahim dan Hanif Suranto (Eds.). Wanita dan Media Kontruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Littlejohn, Stephen W. 1997. *Theories of Human Communication: Fifth Edition*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Mills, Sara. 1997. *Discourse*. London and New York: Routledge.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta: Bandung.